PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA

Skripsi Oleh

IRLIANA PUTRI ANGGRAINI

01031281722112

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

"Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia"

Disusun oleh:

Nama	: Irliana Putri Anggraini
NIM	: 01031281722112
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 18 Agustus 2021

Ketua

(Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIP. 196409031994032001

Tanggal: 2 September 2021

Anggota

(Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA)
NIP. 198605132015042002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Iriliana Putri Anggraini
NIM	: 01031281722112
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 Oktober 2021 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 2 Desember 2021

Ketua	Anggota	Anggota
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA	Meita Rahmawati, SE, M.Acc, Ak., CA	Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA
NIP. 196409031994032001	NIP. 198605132015042002	NIP. 197212152003122001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi,

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
25/01 2022

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA.
NIP.197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Irliana Putri Anggraini
NIM	: 01031281722112
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA

Pembimbing:

Ketua	: Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA
Anggota	: Meita Rahmawati, SE, M.Acc, Ak., CA
Tanggal Ujian:	11 Oktober 2021

Adalah benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 2 Desember 2021
Pembuat Pernyataan

Irliana Putri Anggraini
NIM. 01031281722112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Knowledge is not measured by how much is memorized, but rather by how much it is acted on"

-Imam Syafi'i

"Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow"

-Albert Enstein

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Ayah dan Ibuku tercinta
- Teman – temanku dan Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Sarjana Ekonomi pada Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam semoga selalu terpanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul "**Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia**". Penulis sangat menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*.

Indralaya, 2 Desember 2021
Penulis

Irliana Putri Anggraini
NIM. 01031281722112

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dari berbagi pihak dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena, itu pada kesempatan ini penulisingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT, membalas budi baik seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Achmad Soediro, S.E., M.Comm., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing selama perkuliahan.
5. Ibu Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah senantiasa membimbing serta memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Ibu Meita Rahmawati, SE, M.Acc, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah senantiasa membimbing serta memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
7. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktu serta memberi kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf fakultas ekonomi atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan dan proses administrasi.
10. Papa dan Mamaku tercinta, Yasulin dan Naziroh, dan Adikku tersayang Adelia Inten Cahyani dan Erinda Try Hapsana yang tiada henti melantunkan doa serta memberi dukungan yang teramat berarti kepada penulis.
11. Sahabatku Reskia Ekasari, Meki Aprianti, Wasiatur Rizqiyah, Helen Tri Rizki, Agustina, Mirnawati, Ayu Andira, Titis Sismayanti yang telah menemani hari-hariku selama masa perkuliahan di Universitas Sriwijaya. Masa kuliah ini menjadi begitu bermakna dan mempunyai banyak kenangan manis berkat kalian semua. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan kita. Aamiin.

12. Yogi Abizar, Afif Izzudin, Ahmad Ihsan, dan Rama yang sudah membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini berlangsung.
13. Seluruh rekan kerjaku di PT Harmony Land Group Kak Avri Firdaus, Kak Syamil, Ade Savira, Dina, Widya, Dewani, Rizke, Apriliani, Ana, Arum, Khansa, Widia dan Zikri yang sudah banyak memberi dukungan materil dan non-materil selama proses penulisan proposal dan skripsi. Terimakasih sudah mewarnai 5 bulanku dengan pernah warna dan arti
14. Seluruh pihak lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Indralaya, 2 Desember 2021

Irliana Putri Anggraini
NIM. 01031281722112

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Irliana Putri Anggraini
NIM	: 01031281722112
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 2 Desember 2021

Ketua	Anggota
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA	Meita Rahmawati, SE, M.Acc, Ak., CA
NIP. 196409031994032001	NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA..
NIP.197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA

Oleh:
Irliana Putri Anggraini

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *good governance*, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria tertentu, sehingga sebanyak 18 kementerian/lembaga memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan *E-Views*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja anggaran, sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Kata kunci: *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Kinerja Anggaran.

Ketua,	Anggota,
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA	Meita Rahmawati, SE, M.Acc, Ak., CA
NIP. 196409031994032001	NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA.
NIP.197303171997031002

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND FOLLOW-UP OF INSPECTION RESULT ON PERFORMANCE BUDGETING OF MINISTRY/AGENCY THE INDONESIAN GOVERNMENT

***By*:**

Irliana Putri Anggraini

This study aims to obtain empirical evidence of good governance, internal control system, and follow-up of inspection result on performance budgeting of ministry/agencies the Indonesian government. The sampling technique used in this study is purposive sampling method that uses certain criteria thereby as many as 18 ministry/agency meet the sample criteria. The analytical method used in this study is panel data regression analysis with help of the E-Views. The results shows that good governance and internal control system have effect on performance budgeting, meanwhile follow-up of inspection result have no effect on performance budgeting.

Keywords: *Good Governance, Internal Control System, Follow-up of Inspection Result, and Performance Budgeting.*

Advisor,	***Vice Advisor,***
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak., CA	Meita Rahmawati, SE, M.Acc, Ak., CA
NIP. 196409031994032001	NIP. 198605132015042002

Acknowledge by,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA.
NIP.197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa	: Irliana Putri Anggraini
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 21 Desember 1999
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jl. Swasembada Barat 3 No. 44B RT 013 RW 009, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email	: putriirliana@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2004-2005	: RA Al-Jihad Jakarta
2005-2011	: SDN Kebon Bawang 06 Pagi Jakarta
2011-2014	: SMP Negeri 95 Jakarta
2014-2017	: SMA Negeri 13 Jakarta
2017-2021	: S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Brevet AB Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
2. *British English Center* (Kampung Inggris, Kediri)
3. *Chinese Language Course* (Peking University)

PENGALAMAN ORGANISASI

2018-2019 Staf Kementerian PPSDM, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Sriwijaya

2018-2019 Staf *Ilmy*, Ukhuwah Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sriwijaya

2018-2019 Staf *Research and Development*, Komunitas Edukasi dan Ilmiah Fakultas Ekonomi (KEMI FE) Universitas Sriwijaya

2019-2020 Staf Sekretaris, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi (BEM KM FE) Universitas Sriwijaya

LICENCES & CERTIFICATIONS

2021 *Financial Audit* (*Issuing by*: PwC)

2021 *Investment Management* (*Issued by*: Future Im/Pact)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vii**

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian 10

1.4. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

2.1. Landasan Teori 12

2.1.1.Teori Keagenan (*Agency Theory*) 12

2.1.2.Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Negara 14

DAFTAR ISI (Lanjutan)

2.1.2.1.Pengertian Kinerja 14
2.1.2.2.Indikator Pengukuran Kinerja 14
2.1.2.3.Siklus Penganggaran 15
2.1.3.*Good Governance* 15
2.1.3.1.Pengertian *Good Governance*.....15
2.1.3.2.Ciri-Ciri *Good Governance*.....16
2.1.3.3.Prinsip *Good Governance*.....17
2.1.3.4.Tujuan *Good Governance*.....20
2.1.4.Sistem Pengendalian Internal.....21
2.1.4.1.Pengertian Sistem Pengendalian Internal.....21
2.1.4.2.Komponen Sistem Pengendalian Internal.....22
2.1.4.3.Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal.....25
2.1.5.Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).....26
2.1.5.1.Pengertian TLHP 26
2.1.5.2.Klasifikasi TLHP 27
2.2. Penelitian Terdahulu 28
2.3. Alur Pikir.....32
2.4. Hipotesis.....33
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 36
3.2. Rancangan Penelitian.....36
3.3. Jenis dan Sumber Data 37
3.4. Teknik Pengumpulan Data 37
3.5. Populasi dan Sampel.....37

DAFTAR ISI (Lanjutan)

3.6. Teknik Analisis Data 39

3.6.1.Estimasi Data Panel.....39

3.6.1.1.*Common Effect Model*.....41

3.6.1.2.*Fixed Effect Model* 41

3.6.1.3.*Random Effect Model*.....41

3.6.2.Tahap Analisis Data 41

3.6.2.1.Uji *Chow* atau F *Test*.....41

3.6.2.2.Uji *Hausman* atau Uji T 41

3.6.2.3.Uji *Lagrange Multiplier* 43

3.6.3.Uji Asumsi Klasik.....43

3.6.4.Uji Hipotesis.....45

3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....46

BAB IV HASIL PENELITIAN 49

4.1. Gambaran Hasil Penelitian 49

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....49

4.3. Estimasi Model Regresi 52

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik 54

4.5. Hasil Estimasi Regresi.....58

4.6. Pengujian Hipotesis.....63

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian dan Interpretasi 59

BAB V PENUTUP 67

5.1. Kesimpulan 67

5.2. Keterbatasan 68

DAFTAR ISI (Lanjutan)

5.3. Saran.....68

Daftar Pustaka.....70

Lampiran.....74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 28

Tabel 3.1. Proses Seleksi Sampel 38

Tabel 3.2. Sampel Penelitian.....38

Tabel 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....47

Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif.....50

Tabel 4.2. Uji *Chow* 53

Tabel 4.3. Uji *Hausman* 54

Tabel 4.4. Uji Multikolinieritas 56

Tabel 4.5. Uji *Durbin Watson*.....56

Tabel 4.6. Tabel *Durbin Watson* Tingkat Signifikan 0.05.....57

Tabel 4.7. Uji Heteroskedastisitas.....57

Tabel 4.8. Hasil Estimasi Model.....58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Permasalahan SPI Pada LKKL tahun 2015-2019 4
Gambar 2.1. Alur Pikir 30
Gambar 4.1. Uji Normalitas 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era modernisasi saat ini, sistem penganggaran nasional Indonesia sudah disertai dengan sistem yang semakin baik. Pemerintah telah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Namun, realitanya anggaran yang disusun belum memperhatikan integrasi antara input (pendanaan) dengan outcome (hasil yang diharapkan), sehingga belum bisa memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi suatu program kerja pemerintah (Sutopo *et al.*, 2017). Kondisi tersebut mengakibatkan in-efisiensi dan ketidakhematan belanja negara. Penilaian kinerja lembaga pemerintah patut memperoleh atensi yang sungguh-sungguh karena berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran. Pengukuran pencapaian penyelenggaraan pemerintah diperlukan terdapatnya sistem pemantauan, penilaian, serta pengukuran kinerja yang sistematis. Evaluasi BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diberikan perlu dilakukan, sebab pengukuran kinerja ialah komponen yang berarti serta hendak membagikan umpan balik atas rencana yang sudah diimplementasikan (Aziz, Pratiwi, & Suyono, 2018).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola dengan taat tata tertib pada perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan rasa keadilan dan

kepatutan. Amanat ini cocok dengan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada pengelolaan keuangan negara yang pada kesimpulannya dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Sukmadilaga, Pratama, & Mulyani, 2015). Bukti memperlihatkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan prinsip *good governance* (Sundari & Mulyadi, 2018).

Salah satu fungsi kementerian/lembaga negara adalah penerapan anggaran. Upaya tingkatkan akuntabilitas serta menjamin terselenggaranya *check and balance* dalam proses pelaksanaan anggaran wajib dilaksanakan secara tegas antara pemegang wewenang administratif menggunakan pemegang wewenang kebendaharaan. Penyelenggaraan wewenang administratif diserahkan pada kementerian/lembaga, kebalikannya penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan pada Kementerian Keuangan (Adha, Afiah, & Pratama, 2019). Kewenangan administratif tersebut meliputi pelaksanaan terbentuknya penerimaan dan pengeluaran negara, melaksanakan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan pada kementerian/forum sehubungan dengan realisasi perikatan, serta memerintahkan pembayaran ataupun menagih penerimaan akibat pelaksanaan anggaran (Kawedar *et al.*, 2019).

Good governance, transparansi, serta akuntabilitas menjadi suatu keharusan pada pengelolaan aturan, terutama sesudah reformasi tahun 1998 yang ditandai

menggunakan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Tindakan nyata kementerian/lembaga atas tuntutan akuntabilitas merupakan menggunakan melaporkan laporan keuangan menggunakan akuntabel serta transparan kepada publik. Laporan keuangan tadi selanjutnya harus dianalisis kebenaran serta keandalannya sesuai menggunakan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada bentuk opini yang diberikan BPK RI sesuai dengan amanat UU No. 12 tahun 2004 *Good governance*, transparansi, serta akuntabilitas menjadi suatu keharusan pada pengelolaan aturan, terutama sesudah reformasi tahun 1998 yang ditandai menggunakan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Tindakan nyata kementerian/lembaga atas tuntutan akuntabilitas merupakan menggunakan melaporkan laporan keuangan menggunakan akuntabel serta transparan kepada publik. Laporan keuangan tadi selanjutnya harus dianalisis kebenaran serta keandalannya sesuai menggunakan standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada bentuk opini yang diberikan BPK RI sesuai dengan amanat UU No. 12 tahun 2004 (Adha, Afiah, & Pratama, 2019).

Salah satu tolak ukur kewajaran suatu laporan keuangan kementerian negara terefleksikan dalam pengendalian internal yang dilakukan. Kesadaran akan pentingnya pengendalian internal dibutuhkan organisasi untuk menjamin informasi laporan keuangan valid dan akurat. Kemunculan pengendalian internal keuangan sangat penting karena bisa menambah tingkat profitabilitas organisasi, melindungi integritas informasi laporan keuangan, dan meyakinkan pihak yang berkepentingan terkait

pengukuran kesehatan keuangan (Hasanah, Sasongko, & Bawono, 2019). Peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Presiden selaku kepala Pemerintahan mengendalikan serta menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada area pemerintahan secara menyeluruh (Rahmah & Haryoso, 2018).

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur sistem pengendalian intern yang ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut SAP, laporan keuangan disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan terkait posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Laporan keuangan kementerian/lembaga memperoleh penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) apabila laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Pelaporan keuangan yang wajar pula membutuhkan adanya pengendalian internal yang efektif agar kecurangan laporan tidak terjadi (Tussakdiyah, 2017). Namun, berikut ini adalah data mengenai permasalahan SPI yang diungkap oleh BPK dalam IHPS periode 2015-2019 yang mencerminkan bahwa tata kelola kementerian negara/lembaga di Indonesia belum berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.

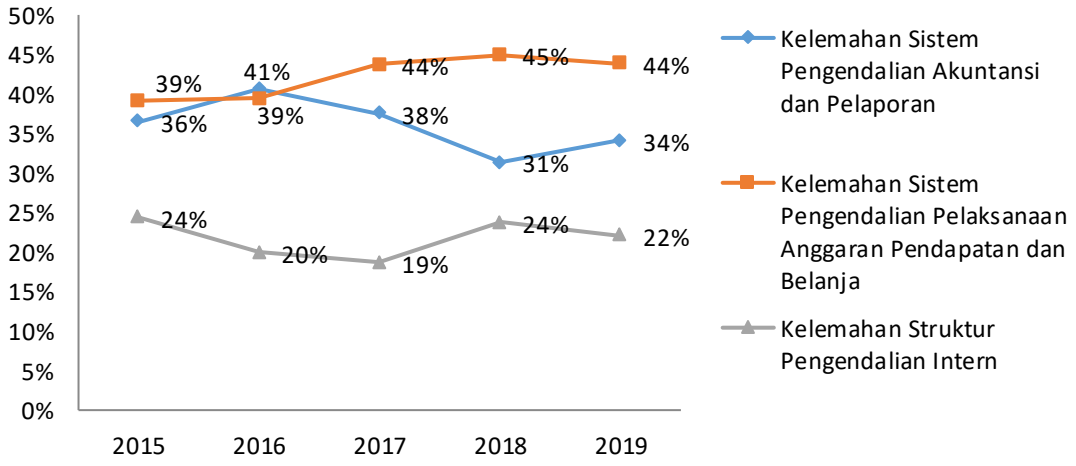

Sumber: Ihps.go.id diakses pada Januari 2021

Gambar 1.1. Permasalahan SPI Pada LKKL tahun 2015-2019

Permasalahan SPI dibagi menjadi 3 kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja, dan struktur pengendalian internal. Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2015-2019 (BPK RI, 2015-2019), Persentase kategori ke-1 paling besar pada tahun 2016 dengan angka 41%, pada kategori ke-2 45% di data tahun 2018, dan kategori ke-3 yaitu tahun 2015 dan 2018 sebesar 24% menjadi angka persentase tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019). BPK menemukan 4.729 kelemahan pada SPI atas 85 LKKL, diantaranya yaitu 1.009 di tahun 2015, 1.046 pada tahun 2016, 871 pada tahun 2016, 902 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 901 permasalahan. Tingginya kelemahan SPI yang terjadi memperlihatkan fungsi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang diberikan BPK tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* dan fungsi TLHP belum dilaksanakan secara maksimal pada data jumlah perkara korupsi tertinggi terdapat di pemerintah pusat dan provinsi, kementerian/lembaga menjadi instansi dengan tingkat tertinggi dalam kasus korupsi di Indonesia sejak awal tahun 2004-2020. Sesuai data yang terlampir, jumlah perkara di DPR/DPRD sebanyak 74, kementerian/lembaga 382, BUMN/BUMD 86, komisi 20, Pemprov dengan 152 perkara. Tindak korupsi tersebut menunjukkan suatu penilaian yang buruk dalam kinerja anggaran instansi pemerintah di Indonesia. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 36 K/L sebesar Rp 352,38 miliar dan USD 78,07 juta belum sesuai ketentuan. Penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban belanja pada 67 K/L sebesar Rp 19.04 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, rendahnya kualitas laporan keuangan disebabkan oleh rendahnya jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga (KPK RI, 2020). Berdasarkan fenomena di atas, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memuat nilai informasi yang memberikan manfaat sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Motivasi penelitian yaitu karena adanya hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan Yudhasena & Putri (2019), membahas masalah mengenai kecurangan yang timbul dalam suatu instansi seperti praktik korupsi, pengelolan pendapatan dan pengelolaan belanja yang tidak sesuai ketentuan, serta menyebabkan kerugian pada

wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sampel yang digunakan berjumlah 3 pegawai pada setiap 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance* (GGG), pengendalian intern, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem. Namun, hasil yang diteliti oleh Kawedar *et al* (2019) *good governance* tidak terbukti berpengaruh pada kinerja keuangan. Penelitian tersebut membahas permasalahan mengenai instansi pemerintah yang tidak mampu menyerap seluruh alokasi anggaran dan tidak dapat melaksanakan program kegiatannya secara optimal dengan sampel penelitian berjumlah 150 responden pada Satuan Kerja (Satker) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II Jawa Tengah.

Gap penelitian selanjutnya bersumber dari penelitian Candrakusuma & Jatmiko (2017) dan Pujiono, Sukarno, & Puspitasari (2016) menyatakan bahwa hasil penelitiannya yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada pengelolaan keuangan daerah dan kinerja Pemerintah Daerah Maluku Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian Pujiono, Sukarno, & Puspitasari (2016) yaitu laporan hasil pemeriksaan atas LK Pemprov Maluku Utara tahun 2013 dengan alasan BPK tidak memberikan pendapat terhadap LK tersebut. Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan Brahmana (2018), hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel dalam penelitian Brahmana (2018) berjumlah 76 responden, dengan rinciannya yaitu 2 responden per 33 Rumah Sakit Vertikal

Kementerian Kesehatan RI dan 10 responden dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Gap dalam variabel TLHP yaitu pada penelitian Subiyantoro (2016). Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut ialah masih banyaknya kelemahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit, serta kurangnya pengawasan dari DPRD dan masyarakat sebagai bentuk pengawasan kontra produktif dengan apa yang telah direncanakan. Penelitian tersebut memiliki 141 sampel dari Pemerintah Kabupaten dan Kota Jember, hasil penelitian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaran pemerintah kabupaten. Namun, hasil penelitian Parwanto & Harto (2017) dan Tjandrakirana *et al* (2019) menyatakan bahwa tindak lanjut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian Tjandrakirana *et al* (2019) yaitu banyaknya peristiwa yang terkait dengan tangkap tangan penyelenggara pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan sampel penelitian berjumlah 18 pemerintah daerah di Sumatera Selatan.

Kebaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini ditambahkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), karena berdasarkan teori yang digunakan yaitu *agency theory*. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan kaitannya dengan *agency theory* yaitu pemerintah sebagi pihak *principal* yang mengelola keuangan negara, maka diharuskan mematuhi standar peraturan yang

berlaku agar bisa memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi pihak *agent*. Hal ini dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Menurut Parwanto & Harto (2017), laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) harus menerapkan efisiensi dan efektivitas terkait sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola pemerintahan, selanjutnya diaudit agar bisa meyakinkan principal sebagai pengguna informasi laporan keuangan terdapat tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan BPK dengan data TLHP berupa pelaksanaan *follow-up* dan implementasi rekomendasi. TLHP diterapkan dengan harapan bisa memaksimalkan penerapan tata kelola dan SPI di lingkungan pemerintahan (Sari, Martani, & Setyaningrum, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, penilaian terhadap kinerja keuangan kementerian/lembaga merupakan suatu hal yang penting untuk ditelusuri dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* dan masyarakat. Selain menggunakan variabel yang umum digunakan seperti GCG dan SPI, TLHP juga menjadi variabel penting untuk memaksimalkan pelaksanaan GCG dan SPI khususnya pada instansi pemerintahan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan mengambil judul "Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia?.

b. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia?.

c. Apakah tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

a. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh positif *good governance* terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia.

b. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia.

c. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini bagi berbagai pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas literatur mengenai fenomena pengaruh *good governance*, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja anggaran kementerian/lembaga pemerintah Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini harapannya bisa memberikan informasi mengenai kondisi kinerja anggaran kementerian/lembaga pada Indonesia yang sedang berjalan untuk bisa menjadi bahan acuan bagi pihak terkait untuk memperbaiki atau menyempurnakan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, A. F., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh Ukuran Entitas dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Kementerian PUPR. *Sistem Informasi, Keuangan, Auiting, Dan Perpajakan*, *3*(2), 122–134.

Aini, U. (2017). Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. *JOM Fekon*, *4*, 2497–2508. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Alach, Z. (2017). *Towards a Standard Conceptual Typology of Public Sector Performance Measurement*. *New Zealand Journal of Social Sciences Online*, *12*(1), 56–69. https://doi.org/10.1080/1177083X.2016.1225579

Aziz, N. J. A., Pratiwi, U., & Suyono, E. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, *20*(04), 1–12. https://doi.org/10.4135/9781849209403.n73

Basuki, A. T. (2019). Buku Praktikum *E-Views* (pp. 1–124). Universitas Muhammadiyah.

BPK RI. (2015-2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015-2019*. Retrieved January 9, 2021, from www.bpk.go.id

BPK RI. (2008). *PP RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

BPK RI. (2010). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2010*.

Brahmana, H. D. (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Informasi sebagai Variabel *Moderating* pada RS Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Candrakusuma, D. A., & Jatmiko, B. (2017). Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 87–93.

DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

Gabriel, A. G. (2017). *Transparency and Accountability in Local Government: Levels of Commitment of Municipal Councillors in Bongabon in the Philippines. Asia Pacific Journal of Public Administration*, *39*(3), 217–223. https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1368902

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasanah, Y. A., Sasongko, N., & Bawono, A. D. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *The 9th University Research Colloqium 2019 Universitas Muhammadiyah Purworejo*.

Kawedar, W., Sodikin, Handayani, R. S., & Purwanto, A. (2019). *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, Dan Kewirausahaan*, *13*(2), 214–222.

Permendagri No.13 Tahun 2006, 1 (2006).

Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *PP RI No. 71 Tahun 2010*.

KPK RI. (2020). *Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi*. www.kpk.go.id

Lembaga Administrasi Negara. (2010). *Processing Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan Eviews*.

Lewis, B. D. (2017). *Local Government Spending and Service Delivery in Indonesia: The Perverse Effects of Substantial Fiscal Resources*. *Regional Studies*, *51*(11), 1695–1707. https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957

Manan, A., Rahmawati, W., & Alfianto, N. (2017). Pemahaman Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kompensasi, dan Kendali Religius terhadap Pengungkapan Fraud Akuntansi oleh Akuntansi Publik. *Dinamika Sosial Budaya*, *19*(2), 178–190.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Meifadillah, I. T. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja SKPD. Universitas Pasundan Bandung.

Menpan RI. (2008). *Peraturan MENPAN No. 15 Tahun 2008*.

DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

Mutmainnah, N. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Sinjai.

Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(1), 35–43.

Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *10*(1), 68–81.

Rahmah, R. N., & Haryoso, P. (2018). Pengaruh Moralitas Individu, Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Advance*, *5*(2), 33–41.

Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. 1–26.

Schandl, A., & Foster, P. L. (2019). *COSO Internal Control - Integrated Framework: An Implementation Guide for the Healthcare Industry* (*Issue January*). https://www.coso.org/Documents/COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework.pdf

Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Retchs Vinding*, *5*(2), 261–274. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 8 JRV 5.2 WATERMARK.pdf

Subiyantoro, P. (2016). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1–111. http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79209/Putut Subiyantoro.pdf?sequence=1

Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). *Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *211*(September), 513–518. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.068

DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

Sundari, D. dan J., & Mulyadi. (2018). Kompetensi Pengelola Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Kementerian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 26–36.

Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). *E-Government, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia*. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, *11*(4), 6–22. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2

Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., Rohman, A., & Widad, A. (2019). Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Profita*, *12*(2), 186. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.002

Tresnawati, F., & Apandi, R. N. N. (2016). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel *Moderating*. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, *8*(1), 1. https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4017

Tussakdiyah, N. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir.

Widiawaty. (2016). Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian/Lembaga Dihubungkan dengan Prinsip *Good Governance* Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *6*(1), 1–11.

Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. A. M. A. D. (2019). Pengaruh *Good Government Governance*, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi*, *28*(1), 434–464.